

ABSTRAK

Vita intania (1193030098): “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Simalungun.”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka stunting di Kabupaten Simalungun dan menjadi lokus stunting pada tahun 2021. Kesejahteraan atas kesehatan sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi dengan baik dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencegahan dan penanganan stunting merupakan bagian dari Siyasah Dusturiyah yaitu untuk menjaga kemaslahatan umat manusia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Mekanisme pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Simalungun. 2) Sistem pengawasan dan penganggaran dalam melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Simalungun. 3) Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap mekanisme pengawasan dan penganggaran tentang masyarakat hidup sehat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Simalungun.

Penelitian ini menggunakan teori siyasah dusturiyah yaitu tanggung jawab negara yang didasari oleh hak dan kewajiban pemerintah dalam menjaga hak kesehatan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian kualitatif, yaitu berdasarkan fenomena dilapangan, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka yang berkaitan dengan bahasan penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah pengumpulan data, memilih data, klasifikasi data, analisis isi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil temuan dalam penelitian ini yaitu, pertama mekanisme pelaksanaan dilakukan dengan delapan aksi konvergensi yang melibatkan program-program lintas sektor yang membantu dalam pencegahan dan penurunan stunting. Kedua pengawasan dilakukan dengan melakukan rapat koordinasi setiap dua kali dalam setahun dan anggaran yang digunakan berasal dari APBD dan Dana Alokasi Khusus yang berasal dari APBN. Ketiga tinjauan siyasah dusturiyah tentang Peraturan Bupati Simalungun Nomor 9 tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat telah sesuai dengan prinsip tanggung jawab negara untuk melindungi hak kesehatan masyarakatnya dan sesuai dengan kaidah kebijakan seorang pemimpin tergantung pada kemaslahatan ummat.

Kata kunci: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Siyasah Dusturiyah, Stunting.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG